

MODEL KOMUNIKASI PERANGKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

Studi Kasus: Pembangunan Jalan di Desa Cinangka Ciampea Bogor

Helnafri Ankesa¹, Rusli Hidayat²

¹Dosen Institut Agama Islam Depok (IAID) Al-Karimiyah

²Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Bogor

helnafri.ankesa@iaidepok.ac.id¹, rslhdyat1704@gmail.com²

Abstract

Road infrastructure development in Cinangka Village is still not maximized. This became the focus of the researcher's study to see the communication model of village officials towards the success of village development, especially road infrastructure development. By using descriptive qualitative methods, the researcher managed to collect data in the field by means of interviews, observation and documentation. The results of this study conclude that the communication model that applies so far is the application of top-down communication. Although there is an agenda or program of musrembang and musdeskus village as a medium of communication between the community and village officials / village government, but in the field, the village party and community leaders are not well established, so that the aspirations of the community are not channeled. An effective communication model between the community and the village administration should be a bottom-up communication model where all empowerment plans are tailored to the needs and circumstances of the Cinangka community. The role of communication in development is related to the direction of change, which means that communication activities must be able to anticipate development movements. There are differences in the old development and communication orientations and the new development and communication orientations that provide an assessment of communication in rural community development so as not to be centralized, linear with isolated processes that need to reflect the diffusion of participation by taking into account the needs of the community, so that development can be realized properly. To unite the interests of government policy with the wants and needs of the community, ideally joint planning can be carried out between the government and the community.

Keywords: Village Apparatus/Village Officials, Road Infrastructure, Communication Model, Development

Abstrak

Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cinangka, masih kurang maksimal. Hal ini menjadi focus kajian peneliti untuk melihat model komunikasi perangkat desa terhadap kesuksesan pembangunan desa khususnya pembangunan infrastruktur jalan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif peneliti berhasil mengumpulkan data lapangan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa model komunikasi yang berlaku sejauh ini adalah penerapan komunikasi top-down. Meskipun ada agenda atau program musrembang dan musdeskus desa sebagai media komunikasi antara masyarakat dan perangkat desa/pemerintahan desa namun lapangan Pihak desa dengan tokoh masyarakat tidak terjalin dengan baik, sehingga aspirasi masyarakat tidak tersalurkan. Sebaiknya model komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan kelurahan adalah model komunikasi bottom-up dimana segala perencanaan pemberdayaan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat Cinangka.

Peranan komunikasi dalam pembangunan terkait dengan arah perubahan yang berarti kegiatan komunikasi harus mampu mengantisipasi gerak pembangunan. Adanya perbedaan orientasi

pembangunan dan komunikasi yang lama serta orientasi pembangunan dan komunikasi yang baru memberikan penilaian tentang komunikasi dalam pembangunan masyarakat pedesaan agar tidak tersentralisasi, linear dengan proses yang terisolasi perlu merefleksikan difusi partisipasi dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan dapat terealisasi dengan baik. Untuk menyatukan adanya kepentingan kebijakan pemerintah dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, maka secara ideal dapat dilakukan perencanaan bersama antara pemerintah dengan masyarakat.

Kata kunci: Aparatur Desa/Perangkat Desa, Infrastruktur Jalan, Model Komunikasi, Pembangunan

PENDAHULUAN

Perangkat desa adalah staff yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenang kepala desa untuk melaksanakan pemerintahan desa dan keperluan masyarakat desa. Oleh sebab itu perangkat desa juga disebut sebagai bagian dari penyelenggara Pemerintahan yang terdapat di desa.

Sebagai bagian dari pemerintahan yang bertugas pada pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana tempat dia bertugas, seorang perangkat desa juga ikut dalam membantu tugas yang dijalankan oleh seorang kepala desa dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat, oleh sebab itu seluruh perangkat desa juga diwajibkan mempunyai sebuah komitmen, keahlian, keterampilan, perasaan dan perhatian yang tulus serta juga memerlukan sebuah rasa peduli yang tinggi oleh seorang perangkat desa guna melaksanakan tugasnya yaitu melayani masyarakat. Dengan tujuan agar masyarakat yang dilayani mendapatkan rasa yang nyaman dan puas dalam pelayanan yang telah dilakukan dari perangkat desa tersebut sehingga dapat memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang terdapat di desa tersebut.

Perhatian pemerintah yang amat sangat besar dalam bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan desa, dapat dibuktikan dari telah dikeluarkannya bermacam kebijakan yang mendasar tentang desa oleh pemerintah. Sebelumnya juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 yang menyerahkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan 8 tahun kemudian tepatnya pada tahun 2014

pemerintah juga telah mengesahkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa ini mengisyaratkan adanya dana desa (DDS) bagi setiap desa yang sangat fantastis, sehingga membuat para aparatur pemerintah utamanya para Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk dapat lebih memahami arti dari peraturan tersebut.

Kebijakan tersebut apabila yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat juga akan secara otomatis dapat mensejahterakan seluruh penyelenggara pemerintah desa yang sudah pasti mengandung tuntutan tanggung jawab serta tanggungjawab kinerja. Menjadi sangat penting agar kepala desa dan perangkat desa pada khususnya dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan serta kesadaran dalam upaya guna meningkatkan kinerja pemerintahan desa tersebut. Salah satunya tergambar dari kualitas pengelolaan keuangan, khususnya keuangan desa mulai dari perencanaan hingga sampai dengan pertanggungjawabannya.

Awal perwujudan masyarakat makmur, adil dan sejahtera terlihat dari salah satunya dalam menghadapi pembangunan, dimana dengan ketaatan kepada Allah SWT dan RasulNya serta ketaatan Kepada Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Nisa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Ayat 59 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman,

taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah Nabi), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (An-Nisa: 59)

Dalam realitasnya, pelaksanan pembangunan dan kesejahteraan umum tidak terlepas dari kinerja pemerintah yang diamanatkan oleh Undang- Undone Dasat 1975 dan Pancasila yang dibantu pelaksanaannya tungan asas tugas pembantuan pemerintah pusat kepada daerah dan desa, sehingga pembangunan di tingkat nasional banyak dipengaruhi oleh faktor kinerja pemerintahan daerah dan desa. Oleh karena itu, perkembangan dan pertumbuhan pembangunan terutama di desa sangat besar pengaruhnya oleh etos kerja aparatur pemerintah desa itu sendiri.

Menjadi sebuah pertanyaan ketika kebijakan pemerintah yang dibuat untuk kebutuhan masyarakat khususnya di Desa tidak terwujud dan tidak dapat di nikmati oleh warga desa itu sendiri. Terbukti dengan infrastruktur jalan di Desa Cinangka yang rusak dan dibiarkan sudah lebih dari lima tahun. Sementara di Desa yang berbatasan dengan Desa Cinangka memiliki jalan yang sangat bagus. Penulis melihat hal ini ada kaitannya dengan penggunaan model komunikasi antar perangkat desa yang sedang menjabat dan atau dengan masyarakat.

Organisasi pemerintahan Desa merupakan system interaksi anggota-anggota organisasi yaitu perangkat desa yang membuat pelbagai kombinasi kebutuhan yang berhubungan dengan konsep, teknologi, dan manusia. Perangkat Desa juga makhluk sosial seperti manusia lainnya yang mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang sulit diduga sebelumnya. Perilakunya timbul dari kebutuhan dan sistem nilai yang dipunyai manusia. Segala permasalahan yang timbul dalam organisasi yang berasal dari manusia, pemecahannya sering mengalami ketidaksempurnaan. Satu-

satunya cara adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang manusia dan kemampuan untuk memperbaiki interaksi unsur manusia di dalam organisasi.

Bekerja di Pemerintahan Desa tidak sama dengan pegawai yang bekerja di instansi dinas tingkat Kabupaten. Apalagi jika dibandingkan dengan karyawan perusahaan swasta. Perangkat Desa adalah abdi masyarakat yang berada di tingkat paling bawah dalam sistem pemerintahan kita. Secara vertikal dia harus mempertanggungjawabkan tugasnya kepada atasan. Mulai dari pertanggungjawaban kepada Kepala Desa, Camat sampai kepada Bupati. Secara horisontal perangkat desa atau pamong desa dalam bekerja langsung berinteraksi dengan masyarakat secara personal. Sehingga kinerjanya bisa langsung dinilai oleh orang yang bersangkutan. Bahkan didikte bagaimana cara dia melaksanakan tugasnya.

Staf atau perangkat desa wajib untuk dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Hasil dari mengerjakan tugas disebut dengan kinerja dan merupakan suatu syarat yang wajib dipenuhi untuk terciptanya hasil yang diperoleh baik yang berupa nilai ataupun yang berupa kualitas, hasil yang diperoleh dapat berupa bentuk nyata maupun berupa angka ataupun data. Penilaian kinerja merupakan penentu keberhasilan seorang perangkat desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja yang optimal tidak terlepas dari bentuk interaksi yang terjadi di dalam badan organisasi pemerintahan desa. Semakin baik interaksi setiap anggota didalam organisasi, akan menunjang kinerja yang baik pula. Efektif tidaknya interaksi yang berlangsung dipengaruhi oleh karakteristik komunikasi yang dibangun.

Dari pengamatan penulis melihat bahwa kinerja perangkat desa yang ada di Desa Cinangka Kabupaten Bogor belum optimal. Terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan yang setiap tahunnya selalu rusak. Padahal jalan tersebut merupakan akses utama bagi masyarakat di desa Cinangka. Adanya sikap yang kurang inisatif, serta belum maksimal dalam menjalin hubungan kerja sama antara

satu dengan yang lainnya. Menurut penulis hal ini terjadi berkaitan dengan masalah interaksi yang kurang efektif antar staf, kepala desa dan atau masyarakat setempat. Maka perlu ditinjau lebih jauh seperti apa model komunikasi yang berlangsung dalam pemerintahan desa cinangka

Berawal dari pengamatan di atas maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dan mengkaji mengenai “Pengaruh Model Komunikasi Perangkat Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus: Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Cinangka Ciampea Bogor)”

METODE

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif deskriptif, yang meneliti objek alamiah. Dalam hal ini, penelitian deskriptif dapat disesuaikan dengan fitur-fiturnya, yang memiliki prosedur tertentu untuk melakukannya. Langkah tersebut dimulai dengan masalah untuk menentukan jenis informasi yang diperlukan, serta cara mengumpulkan data melalui observasi atau pengamatan, pengelolaan data atau informasi, dan menarik kesimpulan penelitian (Noor, 2011). Peneliti akan melakukan perbandingan antara teori dan praktik di lokasi penelitian. Setelah itu, kesimpulan dan rekomendasi dibuat.

b. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini mengacu pada pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan Desa Cinangka di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, yaitu kepala desa, kepala urusan pembangunan, dan semua staf yang terkait serta beberapa tokoh masyarakat setempat.

Kepala Desa mengetahui informasi yang ada di Kantor Desa, termasuk informasi tentang pegawai dan pekerjaan dan pembangunan desa.

Kepala Urusan Pembangunan

bertanggung jawab untuk membantu kepala desa menyiapkan dokumen usulan kegiatan dan pelaksanaan terkait administrasi pembangunan, pengelolaan masyarakat, dan kebijakan teknis pengembangan ekonomi potensial desa.

Tokoh masyarakat di desa seseorang yang dituakan dan dihormati serta disegani yang berada di desa tersebut. Tugas mereka adalah menengahi atau meluruskan kesalahan yang terjadi di masyarakat atau pemerintahan desa. Pembangunan desa juga melibatkan masyarakat.

Objek penelitian adalah model komunikasi perangkat desa terkait pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cinangka Ciampea Bogor.

c. Sumber Data dan Lokasi Penelitian

Sumber data yang diambil adalah dari informan yang sangat dipercaya dalam kegiatan komunikasi aparat desa dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur jalan desa Cinangka. Dalam hal ini peneliti mengambil lima informan yaitu sekretaris desa, bagian kaur keuangan dan kaur perencanaan dan pembangunan, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang berdekatan dengan pembangunan jalan.

Manfaat utama dari data primer adalah bahwa unsur-unsur kebohongan tertutup terhadap sumber fenomena. Oleh karena, data primer lebih mencerminkan kebenaran yang dilihat.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Desa Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dan di sepanjang jalan umum desa cinangka. Peneliti memilih Desa Cinangka sebagai lokasi penelitian karena Desa ini memiliki infrastruktur jalan yang selalu rusak tiap tahunnya dibandingkan dari desa lain yang bersebelahan dengan desa Cinangka. Sedangkan jalan umum di desa Cinangka adalah jalan strategis yang dilewati angkutan umum sehingga dapat dikatakan bahwa jalan ini adalah akses satu-satunya bagi warga setempat menuju desa lain dan

jalan menuju kota. Fasilitas pembangunan di desa ini juga memiliki keunggulan dari desa lain yaitu sudah memiliki kampus dari salah satu perguruan tinggi di Bogor yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Bogor. Dengan adanya perguruan tinggi di desa ini membuat semakin banyaknya pengguna jalan tersebut termasuk warga dari luar desa yang berkuliah di STIDKI Bogor.

d. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tahapan penelitian yang terdiri dari: Pra-analisis konten, analisis konten dan pengolahan data.

- 1) Pra-Analisis merupakan kegiatan berupa menyusun strategi dan menyiapkan instrumen.
- 2) Analisis Konten merupakan kegiatan berupa memahami konten yang berkaitan dengan komunikasi masyarakat dan pemerintah di desa Wadas dalam perspektif islam, melihat pola hubungan antara keduanya, dan mengumpulkan data yang diperlukan.
- 3) Pengolahan data merupakan kegiatan menyajikan kalimat sesuai dengan pembahasan yang akan diolah.

e. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara mendalam

Dalam hal ini, wawancara adalah percakapan yang dilakukan terhadap suatu pihak dengan tujuan tertentu. Peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk melakukan wawancara secara langsung dengan responden.

2) Observasi

Penelitian ini bergantung pada observasi, dengan mengumpulkan data, atau fakta tentang kondisi sebenarnya.

Observasi yang dilakukan dengan pengumpulan data dari wawancara yang tidak berstruktur. Secara umum, observasi dilakukan dengan mempertimbangkan fakta bahwa fakta di lapangan sering kali

berbeda dengan pernyataan orang. Selanjutnya, peneliti melakukan observasi di lapangan tentang segala hal yang terkait dengan ruang dan waktu, orang, kegiatan, benda-benda, tujuan, dan peristiwa.

3) Dokumentasi

Peneliti akan mengumpulkan fakta dan data yang disimpan dalam bahan yang didokumentasikan. Sebagian besar data yang tersedia dalam bentuk surat, catatan harian, cenderamata, laporan, dan foto.

kemudian menyalin data atau arsip yang tersedia. Dalam hal ini, dokumentasi adalah bahan tertulis atau foto yang diarsipkan karena permintaan penyidik yang relevan. Dokumentasi diperlukan untuk mendorong dan bermanfaat sebagai bukti untuk penelitian ini

HASIL

Proses Kegiatan Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Cinangka

1. Tahap Sosialisasi Program Pembangunan

Dalam melakukan perencanaan dan pembangunan, Aparatur desa tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena butuh partisipasi masyarakat dalam komunikasi tentang pembangunan dan pemberdayaan apa saja di masing masing wilayah desa. Untuk itu, Aparatur desa dalam merancang susunan dalam pembangunan membutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan dengan cara mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti pak RT/RW, tokoh masyarakat, BPD dan LPMD.

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 yang menekankan fokus pembangunan Indonesia harus dimulai dari unit terkecil pemerintahan, yaitu desa. Penerbitan UU tersebut kemudian diikuti dengan PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Terlihat bahwa sumber anggaran

pembangunan desa selama ini sebagian besar berasal dari dana APBD, baik APBD Provinsi Kabupaten/Kota. Kini, berdasarkan UU dan PP di atas, maka desa mendapatkan sumber anggaran pembangunan baru yaitu alokasi dana dari APBN secara langsung.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini pula desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Dengan pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Pihak pemerintah desa Cinangka sendiri melalui sekretaris desa mengatakan “Dulu sebelum ada dana desa dari APBN, itu ya tetap ada APBDes, kemudian dari program pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk pemberdayaan dan pembangunan secara intensif diseluruh desa yang ada di Indonesia. Namun dari keterangan pihak desa, adanya perbedaan pemahaman antara pihak desa dengan pihak kecamatan terkait pendanaan pembangunan infrastruktur jalan di desa Cinangka. Menurut pihak desa yang di wakili oleh kepala desa dan staf keuangan, bahwasannya pembangunan jalan desa Cinangka adalah jobdesk pihak kecamatan. Karena dana pembangunan jalan tersebut masih berada di pihka kecamatan itu sendiri. Kepala desa cinangka menegaskan dengan memberikan contoh desa tetangga yang memiliki jalan beton yang bagus. Jalan tersebut dibangun oleh pihak kecamatan setempat. Oleh sebab itu pihak desa tidak memprioritaskan dana yang ada di desa Cinangka untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Desa Cinangka awal mendapat bantuan program pemerintah untuk desa pertama kali itu mendapat dana sebesar 700 juta sekian. Setelah itu desa menerima informasi, dan pemerintah

desa diharuskan mengikuti bimtek yang dianjurkan pemerintah kabupaten dari pemerintah pusat. Tujuanya agar mengerti tentang pemanfaatan bantuan dana, kedua tentang pencairan karena pencairannya melalui tahapan. Misalnya pencairannya dibagi 3 kali seperti 40%-30%-30%. Jadi tidak langsung dicairkan semuanya.”tutur pak sekdes.

Hal ini yang nantinya akan dikelola dari pihak desa melalui rancangan yang dibuat seperti prioritas mana yang didahulukan dengan mendapat anggaran bantuan dari pemerintah. Sesuai dengan program pemerintah yang mengedepankan untuk pembangunan dan perencanaan desa, untuk itu pihak desa segera membuat laporan pertanggung jawaban rencana apa yang akan digunakan untuk menggunakan dana bantuan pemerintah tersebut. karena itu merupakan syarat yang harus dilaporkan kepada inspektorat untuk pencairan dana tahap pertama.

2. Tahap Musyawarah Desa

Langkah aparat desa dalam komunikasi dengan masyarakat terbilang sangat aktif. Untuk itu sangat membantu masyarakat dalam mengetahui perkembangan dan pengelolaan desa secara transparan. Hal ini yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa cukup tinggi dan berharap apapun yang dikeluhkan masyarakat dapat ditampung dan dapat direalisasikan oleh pihak pemerintah desa.

Dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan masyarakat yang diadakan di Balai desa yang membahas mengenai pembangunan desa. Di dalam pertemuan tersebut terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dan pihak pemerintah desa. Pada umumnya pola pikir dari masyarakat beranggapan bahwa dana yang ada di desa harus direalisasikan semua ke pembangunan desa. Sedangkan pihak apaat desa berharap sebagian dana yang ada pada desa dapat digunakan untuk pemberdayaan pola pikirnya. Walaupun memang ada dana yang dialokasikan untuk pembangunan yang diprioritaskan seperti saluran air, peninggian

jalan, karena memang masyarakat membutuhkan itu. Karena itu yang bisa terlihat nyata.” Tutur pak sekdes.

Oleh sebab itu pentingnya komunikasi masyarakat dan pihak pemerintah desa dalam hal ini bertujuan lebih mengerti kondisi yang harus diutamakan dalam pembangunan di masyarakat. Namun, tujuan pihak pemerintah desa juga ingin semua masyarakat mengetahui jika desa Cinangka memiliki 4 dusun yang dimana nantinya dalam pembangunan ini harus merata dan sesuai skala prioritas tanpa membedakan dusun yang satu dengan dusun yang lainnya. Jadi semua dalam forum musyawarah itu dapat menerima dan bermufakat bersama dalam hal pembangunan desa. Itulah cara aparat desa untuk memberikan sosialisasi terkait dana anggaran bantuan yang diberikan pemerintah kepada desa dalam perencanaan pembangunan desa. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat sangat berperan dalam penggunaan dana desa yang merupakan program pemerintah sehingga transparansi dana juga bisa diketahui oleh masyarakat.

3. Tahap Implementasi

Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan untuk pembangunan infrastruktur desa melalui Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) di hampir semua desa yang ada di Kabupaten Bogor di Tahun Anggaran (TA) 2021. Seperti halnya di Desa Cinangka Kecamatan Ciampea, yang kemudian bantuan tersebut langsung direalisasikan untuk pembangunan betonisasi jalan desa.

Ketua TPK, Suwardi mengatakan bahwa dana Samisade 60% betonisasi menggunakan jayamix. Kegiatan realisasi samisade tersebut, 900 meter yang berlokasi di kampung Cikalancing RT 03 RW 07. Menurut Suwardi pembangunan infrastruktur betonisasi jalan desa, memang sangat diharapkan warga masyarakat. Sebab itu dirinya berharap masyarakat turut mengambil peranan dalam menjaga dan merawat hasil dari pembangunan tersebut.

Namun keterangan berbeda yang disampaikan oleh Kaur Perencanaan dan

Pembangunan Desa Cinangka yaitu Nilam bahwa “membangun infrastruktur jalan itu tidak sembarangan, tidak asal membangun karena sesuai kebutuhan namun lebih dahulu melalui proses pelaporan seperti panjang jalan berapa, kedalaman kerusakan jalan, pengurusannya dimana karena itu harus real dimana nantinya seperti SPP (Surat pembayaran ke bank), itu nantinya ditanya oleh pihak inspektorat mengenai rincianya itu bertujuan untuk membuktikan realisasi pencairan harus sesuai dengan pembangunan yang diajukan dilapangan”. Tutur Ibu kaur perencanaan.

Hal ini membutuhkan aparat desa tidak bisa sembarangan menggunakan dana bantuan dari pemerintah dengan kemauanya sendiri karena harus sesuai dan ada partisipasi masyarakat didalamnya. Jadi, cara aparat desa setiap kali menerima program anggaran dana dari pemerintah setiap tahunnya, untuk perencanaan dan pembangunan, Langkah aparat desa selalu menggunakan komunikasi langsung dengan masyarakatnya dengan cara bermusyawarah mengadakan pertemuan di Balai desa. Kemudian untuk menyikapi dana desa, pemerintah desa sudah mengetahui pagu, dimana setiap tahunnya akan mendapat giliran dusun mana yang akan menerima pagu dana yang lebih diprioritaskan. Kemudian memilah dan menyampaikan kepada RT/RW, BPD, dan LPMD untuk melakukan musyawarah Dusun terlebih dahulu sebelum disampaikan kedalam forum musyawarah desa.

Setelah itu, dusun yang mendapat giliran pagu pembangunan menurut Ibu Diana sebagai informan mengatakan “Biasanya, pihak pemdes memberikan blanko isian kepada setiap RT untuk mengisi hal mana saja yang digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan di wilayah dusun masing-masing. Nanti yang lebih membutuhkan yang mana, karena memakai skala prioritas. Setelah aspirasi masyarakat diwakili masing-masing RT yang sudah ditulis dalam blanko tadi kemudian diadakan musyawarah desa.

Pembangunan ini lebih mengutamakan kegiatan mendidik dan memberi motivasi kepada masyarakat agar menjadi lebih baik.

Komunikasi pembangunan bertujuan untuk menanamkan gagasan-gagasan sikap netral, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak hanya membenahi saluran air untuk mencegah banjir dimusim hujan, pemerintah desa memaksimalkan dana yang diberikan pemerintah untuk membenahi segala kekurangan yang sudah diusulkan oleh masyarakat. Seperti contoh pembangunan infrastruktur jalan, yang bertujuan membenahi akses jalur yang ada didesa menjadi lebih baik. Semuanya terlaksana berkat proses komunikasi yang terjalin antara masyarakat dan juga pihak Appartur desa.

Melalui kaur pembangunan dan perencanaan menambahkan tidak hanya pembangunan infrastruktur jalan akan tetapi juga untuk pembangunan dan perencanaan gedung serbaguna yang bertujuan nantinya untuk seluruh kegiatan masyarakat. Seperti digunakan untuk olahraga badminton, futsal, hingga acara pernikahan dll bisa memakai fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah desa. Dengan ini masyarakat saling lebih aktif untuk beraktivitas di dalam desa nya sendiri. Gedung serbaguna ini diharapkan juga dapat dikelola oleh pemerintah desa untuk menambah pemasukan. Dengan cara menyewakan kepada pihak luar apabila ingin menggunakannya.

Meskipun sebelumnya saat mengadakan Launching Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) yang bertempat di kampung cikalancing RT 03 RW 07 Pemerintahan Desa Cinangka Kecamatan Ciampea, turut hadir dalam acara tersebut selain kepala desa, Yudhy Sekcam Kecamatan Ciampea didampingi Kasie Pemerintahan, BPD, LPM, Bhabhinkamtibmas serta Babninsa. Telah disampaikan tujuan SAMISADE adalah mendorong ekonomi sekaligus mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) Desa. terlebih dimasa-masa sulit saat ini. masa pandemi covid-19. Kepala Desa Cinangka Oman Abdurahman, menyampaikan juga bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan cor beton, dengan PKTD pihaknya melibatkan masyarakat setempat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Bahkan sudah

ada ungkapan dari kepala desa tentang perencanaan pembangunan, jalan sepanjang 900 meter lebar 3 meter dan ketebalan 0,15 meter yang beralokasi di kampung Cikalancing RT 03 RW 07, usulan dan pengerjaannya sudah melalui Musdes. Kepala desa menjelaskan "Dengan dibangunnya jalan ini semoga mempermudah akses mobilitas perekonomian masyarakat yang berada di perbatasan antara Desa Cinangka dengan Desa Bojongjengkol terutama para petani yang membawa hasil pertanian".

Menurut kepala desa program Samisade sangat membantu dalam merealisasikan infrastruktur jalan, karena selama ini dengan adanya pandemi Covid-19, bantuan Dana Desapun kurang menyentuh disektor pembangunan, disebabkan alokasinya untuk pengentasan Covid-19. Selain itu dalam sambutannya Yudhy Utomo, S.IP, Sekcam Kecamatan Ciampea menjelaskan "Samisade merupakan program yang bertujuan mendonkrak perekonomian desa "proyek pembangunan jalan ini dikerjakan dengan sistem padat karya yang melibatkan penduduk setempat", Tujuan kegiatan padat karya itu untuk pemberdayaan masyarakat serta membuka lapangan kerja bagi warga setempat disaat pandemi Covid-19 saat itu"

Pada kenyataannya dilapangan hingga saat ini banyak program pembangunan di Desa belum dapat terealisasikan, karena keterbatasan anggaran desa. Namun pihak desa sedang mengajukan proposal pencairan dana kembali untuk pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan jalan kepada pihak pemerintahan pusat. Seperti yang disampaikan oleh Dian sebagai kaur keuangan "Seluruh pembangunan yang telah dilakukan semuanya tidak langsung sekejap bisa dilaksanakan, karena pencairan dari pemerintah itu bertahap. Oleh sebab itu, dari awal pertama menerima dana APBN tahun 2016 hingga saat ini yang digunakan untuk pembangunan, setiap tahunnya selalu dibuat rancangan pembangunan apa saja yang harus diperioritaskan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah semua selesai, kemudian barulah membuat rancangan pembangunan

yang bisa menambah fasilitas desa yang belum ada. Ini semua juga harus dibuatkan laporan terlebih dahulu karena itu merupakan syarat wajib untuk mencairkan dana yang diberikan pemerintah agar jelas penggunaannya.” Tutur Ibu Dian selaku kaur keuangan.

Kegiatan Komunikasi Aparat Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Cinangka

1. Jenis Komunikasi Aparat Desa

a. Musrenbang Desa

Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istilah populer dalam penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran di daerah dan desa, bersamaan dengan penertbitan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sedangkan untuk musrenbang desa dinyatakan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 pasal 1 ayat (11) yang menyebutkan bahwa musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan 5 tahun dan 1 tahun.

Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan konsep dan proses yang tidak terpisahkan. Rencana pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa anggaran atau sumber pembiayaannya. Di tingkat desa disusun dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Konsep ‘musyawarah’ menunjukkan bahwa forum musyawarah perencanaan desa bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah jelas berarti merupakan forum untuk merembukkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama.

Dalam UU Desa pasal 78 dan 79 mensyaratkan keharusan bagi pemerintah desa

untuk melaksanakan perencanaan pembangunan desa dalam rangka menyusun visi bersama membangun desa antara masyarakat dan pemerintahan desa. Oleh sebab itu musrenbang desa merupakan salah satu proses untuk dalam pengelolaan pembangunan desa. Tujuan diadakan nya Musrenbangdes itu untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa, kemudian pembentukan tim penyusun RPJM desa, dilanjutkan pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program, penyusunan rancangan RKP desa melalui musyawarah, penetapan dan dilanjutkan dengan pengajuan.

“Pentingnya musrenbangdes ini untuk proses dan komunikasinya bisa berjalan dari pihak aparat desa dengan masyarakat. Tidak serta-merta pembangunan itu ada, karena apabila usulan kegiatan tidak dari bawah, ketika meng-aplikasikan dilapangan akan mendapat teguran atau protes dari masyarakat, hal itu yang ingin dihindari oleh aparat desa.” Tutur sekretaris desa.

b. Musdeskus Desa

Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) adalah forum khusus yang diadakan oleh pemerintah desa untuk membahas kebijakan tertentu atau program-program mendesak. Dalam konteks ini, Musdesus BLT menjadi platform untuk membahas dan menetapkan kebijakan terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai. Tujuan Musdesus untuk mendorong partisipasi aktif warga desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pembangunan desa. Seperti yang dijelaskan oleh pak kepala desa cinangka mengatakan ” Didalam desa itu sering melakukan musdesus yaitu musyawarah desa khusus itu melibatkan berbagai macam khususnya yang ada kaitannya dengan pembangunan di desa dari mulai lpm, Ketua RT/RW yang ada di wilayah yang dibangun, BPD, termasuk juga kaur perencanaan inilah yang memulai kendali sepenuhnya.”

Selain dua bentuk musyawarah yang dibelakukan sebagai pendekatan komunikasi antara masyarakat dengan aparat desa atau sesama anggota pemerintahan desa, peran

organisasi karang taruna disini sangat bisa dimaksimalkan. Aparatur desa telah memberikan pelatihan kepada karang taruna agar bisa mengelolanya dan bisa menjadi aset desa yang harus dijaga. “Tapi yang jelas tujuan dibentuknya karang taruna ini adalah untuk kepentingan masyarakat desa Cinangka sendiri, agar dapat lebih bersosialisasi antar masyarakat terutama kegiatan sosial maupun rohani bisa lebih sering aktif digelar.” Tambah pak sekretaris desa.

2. Keterlibatan Perwakilan Masyarakat

Partisipasi yang dilakukan masyarakat selalu diperankan secara dominan oleh tokoh masyarakat. Pengertian Tokoh Masyarakat sendiri diartikan juga dengan elit masyarakat dimana, ia bertindak mewakili masyarakat/mengatas namakannya. Tokoh masyarakat dapat dikategorikan atau dibagi kedalam, Tokoh masyarakat formal atau elit formal dan tokoh masyarakat informal atau elit informal. Elite menurut Lipset dan Solari (2001), dengan mengutip posisi di puncak struktur-struktur sosial terpenting yaitu dalam bidang ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan bebas.

Partisipasi tokoh masyarakat adalah keterlibatan masyarakat yang diperankan oleh elit non formal. Jadi berbicara partisipasi tokoh masyarakat berarti berbicara partisipasi masyarakat itu sendiri. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah peran serta semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Pengelolaan Pembangunan infrastruktur jalan di desa Cinangka seharusnya berjalan dengan lancar dengan adanya komunikasi yang dilakukan aparatur desa dengan masyarakat. Namun pada kenyataannya sampai saat ini

pembangunan infrastruktur jalan seperti dikesampingkan dengan berbagai alasan. Dalam hal ini tokoh masyarakat menjadi sosok yang paling berperan dalam hal terlibatnya komunikasi. “saya mengusulkan ketika itu melihat kondisi lingkungan warga yang gang rumahnya perlu diperbaiki, sehingga sebaiknya diadakan perencanaan pembangunan perbaikan jalan di setiap gang yang sekiranya jalan gang tersebut rusak dan membutuhkan perbaikan” Ujar bapak Mujiono selaku Tokoh Agama, Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada.

Yang dilakukan oleh tokoh masyarakat desa cinangka sesuai dengan yang telah disampaikan dalam al-quran dalam surat An-nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

“Segala fasilitas pembangunan yang ada di desa ini, semua terjadi berkat peran masyarakat dan aparat desa yang menjalin komunikasi secara baik. Warga terus memberikan masukan kepada pemerintah desa, mengenai hal untuk kemajuan desa kedepannya. Sekarang tinggal masyarakat yang memberi bukti kepada aparatur desa selaku pemegang pemerintahan desa jika masyarakat bisa menjaga segala fasilitas yang telah dibangun”

PEMBAHASAN

1. Model komunikasi Aparat Desa Cinangka

Perencanaan dengan pendekatan top-down dan bottom-up tertuang dalam Undang Undang No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional, dijelaskan dalam

Bappenas (2005) terkait perencanaan wilayah. Dalam Sururi (2016), perencanaan top-down merupakan perencanaan di mana penguasaan tertinggi berada di pemerintah sebagai pemberi arahan, tanpa harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pendekatan top-down dianggap sangat minim. Sehingga berdasarkan data empiris di lapangan, dalam pelaksanaannya pendekatan tersebut dianggap kurang berhasil, Kholil (2005).

Ada perbedaan yang sangat kental antara pendekatan top-down dan bottom-up. Salah satunya adalah pendekatan top-down sering kali terdapat unsur kepentingan di dalamnya sehingga tidak terdapat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Sedangkan pendekatan bottom-up merupakan perencanaan yang berasal dari bawah menuju ke atas. Hjern dalam Ekowati, 2009 menjelaskan bahwa perencanaan bottom-up memberikan ruang bagi para implementator untuk dapat menyesuaikan strategi yang direncanakan dengan kondisi riil yang dihadapi. Pendekatan ini didasarkan oleh dorongan masyarakat untuk dapat mengimplementasikan kebijakannya sendiri. (Susanti, Suwandono, & Mussadun, 2019).

Desa cinangka terdiri dari 4 dusun, 10 Rw dan 48 Rt menggunakan 2 jenis komunikasi sekaligus dalam mewujudkan pembangunan desa, yakni pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Pendekatan top down merupakan pendekatan yang paling umum diterapkan mayoritas pemerintahan daerah Desa, yang mana komunikasi dan arahan ditetapkan oleh pemimpin dalam hal ini adalah kepala desa. Begitu juga yang diterapkan oleh pemerintahan kecamatan kepada desa.

Namun ada beberapa program pembangunan yang menggunakan pendekatan komunikasi bottom up karena sebagian besar ditetapkan dan disuarakan oleh masyarakat, dan disampaikan kepada aparat desa atau pemerintahan desa.

Dalam kasus pembangunan infrastruktur jalan di desa Cinangka yang terlihat adalah pendekatan komunikasi top down dari pemerintahan kecamatan terhadap

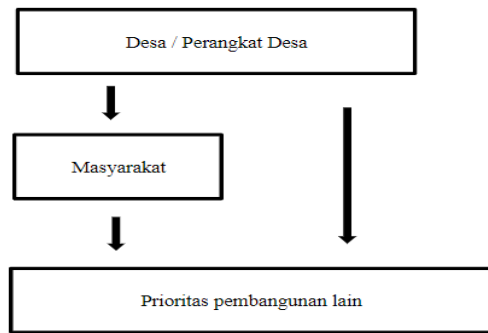
pemerintahan desa, sehingga desa tidak bisa optimal dalam membangun jalan. Namun desa tetap berinisiatif untuk memperbaiki jalan tiap tahunnya dengan sisa dana seadanya di desa. Alhasil setiap tahun pula jalan tersebut harus mengalami kerusakan parah karena pembangunan yang seadanya dan tidak bertahan lama. Sedangkan pendekatan komunikasi bottom up juga sudah dilakukan oleh warga setempat kepada pemerintahan desa, bahkan warga membantu pemerintahan desa dalam mencari solusi untuk pembangunan jalan dengan meminta sumbangan kepada warga setempat yang dilakukan di jalan yang rusak tersebut.

2. Pengaruh Model Komunikasi terhadap pembangunan desa cinangka

Komunikasi pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan desa, karena mampu mempengaruhi dan merubah perilaku serta pemahaman masyarakat desa. Beberapa teori yang digunakan dalam komunikasi pembangunan antara lain, teori modernisasi, teori partisipasi, teori perubahan sosial, dan teori agenda setting. Dalam penerapan komunikasi pembangunan dalam membangun desa, terdapat banyak kasus yang dapat dijadikan sebagai contoh, salah satunya adalah program Inovasi Desa yang dilakukan oleh pemerintah.

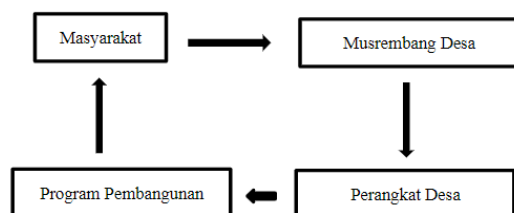
Dalam membangun desa, komunikasi pembangunan memegang peran yang sangat penting. Dalam menerapkan program komunikasi pembangunan, perlu memperhatikan jenis komunikasi, metode komunikasi yang efektif, hambatan yang mungkin terjadi, dan manfaat yang dapat diperoleh dari program tersebut. Melalui studi kasus, kita juga dapat melihat contoh nyata tentang efektivitas komunikasi pembangunan dalam membangun desa. Oleh karena itu, penggunaan komunikasi pembangunan perlu dijadikan sebagai salah satu strategi yang disiplin dalam membangun desa. Realitas model komunikasi di Cinangka disajikan pada

gambar berikut



Berdasarkan Gambar 1. dapat kita ketahui bahwa model komunikasi yang terjadi di Desa Ciangka adalah model komunikasi top-down. Top-down merupakan perencanaan dimana penguasaan tertinggi berada di pemerintah sebagai pemberi arahan, tanpa harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Pendekatan top-down relatif minim, sering kali terdapat unsur kepentingan di dalamnya sehingga tidak terdapat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Seperti yang diketahui di Desa Cinangka aspirasi masyarakat memang di dengarkan namun realisasinya tidak berjalan sesuai yang di inginkan masyarakat. Skema ideal model komunikasi di Cinangka seharusnya berlaku model komunikasi bottom-up seperti yang tersaji pada Gambar 2.



Dari skema Gambar 2 Bottom-up merupakan perencanaan yang berasal dari bawah menuju ke atas. Perencanaan ini memberikan ruang bagi para implementator untuk dapat menyesuaikan strategi yang direncanakan dengan kondisi riil yang dihadapi sesuai dengan keadaan masyarakat di Desa Cinangka untuk diberlakukannya pemberdayaan masyarakat.

Metode komunikasi pembangunan yang efektif adalah metode yang dapat mencapai tujuan pembangunan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang terjadi pada

kenyataannya warga sempat geram dengan memblokir jalan yang menjadi penghubung Kecamatan Ciampea dengan Kecamatan Tenjolaya. Namun tak lama kemudian jalur itu kembali dibuka oleh warga. Bahkan warga Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor menanam pohon pisang di tengah jalan rusak. Aksi ini sebagai bentuk protes lantaran jalan rusak tak kunjung diperbaiki.

Menurut warga, jalan penghubung antar kecamatan tersebut telah rusak parah sejak beberapa tahun lalu, sehingga sangat menghambat aktivitas warga. Kondisi jalan yang rusak juga semakin parah ketika hujan turun. "Kerusakan sudah tahunan. Karena dibiarkan berlubang terlalu lama akhirnya kerusakannya terus meluas," ucap Ketua RT04/05, Sarkam. Warga yang mengendarai mobil atau sepeda motor akan mengalami kesulitan melintasi jalan tersebut. Tidak jarang mobil maupun motor wisatawan yang melintas sampai tergelincir dan terjebak di jalan berlubang dan berlumpur. "Ya kami menuntut hak persamaan. Katanya negara kita sudah merdeka," kata Hasyim Adnan Wakil Ketua Paguyuban RT/RW Desa Cinangka.

Selain menanam pohon pisang, warga juga membentangkan spanduk protes terhadap pemerintah daerah yang dinilai abai dengan pembangunan infrastruktur jalan. Mereka juga memasang spanduk bertuliskan menolak kehadiran calon legislatif (caleg) dan mengancam Golput pada saat Pilkada maupun Pemilu 2024, jika ruas Jalan Abdul Fatah tidak segera diperbaiki. Hal ini menggambarkan bahwa gagalnya komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan pemeritahan desa yang berakibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur desa.

Sebenarnya ada beberapa metode komunikasi pembangunan yang efektif adalah melalui media massa, penyuluhan, dan pelatihan. Media massa seperti radio dan televisi sangat efektif dalam menyampaikan informasi terkait program pembangunan dan menjadi sarana untuk melakukan evaluasi. Penyuluhan dan pelatihan juga merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam hal tertentu. Namun ada beberapa hambatan yang sering dihadapi dalam menerapkan program komunikasi pembangunan adalah terkait dengan masalah biaya, keterbatasan dalam sumber daya manusia dan teknis, serta kesulitan untuk mencapai masyarakat yang terisolasi. Selain itu, konteks budaya dan gender juga perlu diperhatikan dalam penggunaan metode komunikasi pembangunan.

3. Hasil pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Cinangka

Jika dilihat dari hasil pembangunan jalan setiap tahunnya selalu mengalami kerusakan parah karena pembangunan infrastruktur jalan selama di desa Cinangka selama ini hanya dilakukan seadanya, tidak sesuai dengan arahan yang pernah disampaikan kepala desa yaitu dengan pembangunan beton untuk jalan agar jalan lebih tahan lama. Akan tetapi kenyataannya dana yang di pakai untuk memperbaiki jalan menjadi mubazir karena jalan tetap saja rusak hanya berselang sebulan diperbaiki.

Banyak keluhan yang disampaikan warga Cinangka terhadap jalan desa yang selalu rusak. Warga berharap program Samisade di kelola dengan baik, transparan dan akuntabel mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban; agar bermanfaat sesuai tujuan dan harapan.

SIMPULAN

Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cinangka, masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan model komunikasi yang berlaku sejauh ini adalah penerapan komunikasi top-down. Pihak kelurahan dengan tokoh masyarakat tidak terjalin dengan baik, sehingga aspirasi masyarakat tidak tersalurkan. Sebaiknya model komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan Desa adalah model komunikasi bottom-up dimana segala perencanaan pemberdayaan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat Cinangka.

Peranan komunikasi dalam pembangunan terkait dengan arah perubahan yang berarti kegiatan komunikasi harus mampu mengantisipasi gerak pembangunan. Adanya perbedaan orientasi pembangunan dan komunikasi yang lama serta orientasi pembangunan dan komunikasi yang baru memberikan penilaian tentang komunikasi dalam pembangunan masyarakat pedesaan agar tidak tersentralisasi, linear dengan proses yang terisolasi perlu merefleksikan difusi partisipasi dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan dapat terealisasi dengan baik.

Untuk menyatukan adanya kepentingan kebijakan pemerintah dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, maka secara ideal dapat dilakukan perencanaan bersama antara pemerintah dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS RI. 2005. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2005-2009, Bappenas: Jakarta.
- Ekowati, M. R. (2009). Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program. Surakarta: Pustaka Caraka
- Kholil. (2005). Rekayasa Model Sistem Dinamik Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Nirlimbah (zerowaste) studi kasus di Jakarta Selatan. Institut Pertanian Bogor.
- Sururi, A. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. Jurnal Administrasi Negara, 3 Nomor 2, 1–25.
- Susanti dkk (2019). Proses Partisipatif Penyusunan Desain Wisata Industri Batu Bata di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Jurnal Pasopati; 'Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi